

# Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Denny Hambali<sup>1</sup>, Reza Muhammad Rizqi<sup>2</sup>

Universitas Teknologi Sumbawa – <sup>1</sup>denny.hambali@uts.ac.id

– <sup>2</sup>reza.muhammad.rizqi@uts.ac.id

**Abstrak**— *This research aims to determine the influence of the presentation of financial reports and the accessibility of financial reports on the accountability of village financial management. The sample in this research was village officials or officials in Utan District, Sumbawa Regency, totaling 9 villages with a total sample of 45 respondents. The research results show that the presentation of financial reports influences the accountability of village financial management and the accessibility of financial reports influences the accountability of village financial management. Then, simultaneously presenting financial reports and accessibility of financial reports, influences the accountability of village financial management in Utan District, Sumbawa Regency. In conclusion, accountability in managing village money is an important part of carrying out good village governance. This is necessary to ensure that village funds are used clearly, effectively and efficiently, as well as improving the standard of living of the people in the village.*

**Keywords** — *Presentation of Financial Reports, Accessibility of Financial Reports, Accountability, Village Financial Management.*

## 1. PENDAHULUAN

Desa di Indonesia merupakan entitas penting dalam kerangka pemerintahan Indonesia dan mempunyai peranan penting dalam aktualisasi pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian Mubyarto dan Suryatini (2020), desa sebagai basis negara memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Terdapat tonggak sejarah penting dalam pemerintahan desa yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan UU Desa. Menurut Soetjipto (2018), undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan potensinya. Sesuai dengan Pasal 1 undang-undang tersebut, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Desa juga diberi wewenang untuk mengurus dan mengendalikan urusan pemerintahan. Desa diberikan yurisdiksi atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat, yang kesemuanya diakui dan dilindungi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurrizkiana dkk, 2017). Dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai kepentingan lokal dan latar belakang budaya yang ada.

Keberadaan desa berfungsi sebagai lembaga pemerintahan tingkat utama di Indonesia, yang memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini menjadi landasan pemenuhan hak masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Putri dan Maryono, 2022). Menurut Pratama dkk. (2021), undang-undang desa menjelaskan bahwa desa berfungsi sebagai sarana untuk membimbing pemerintah desa secara efektif dan efisien dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pemerintah Indonesia baru-baru ini menerapkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mendesentralisasikan pemerintahan dengan memberdayakan daerah-daerah dan daerah pinggiran. Hal ini melibatkan pemberian peran yang lebih signifikan kepada pemerintah desa dalam pembangunan komunitas mereka sendiri (Pramayana et al., 2022). UU Desa memberikan hak yang lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan wewenang dan mengalokasikan sumber daya untuk tujuan mendorong kemajuan desa. Hal ini mencakup kegiatan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik (Arfiansyah, 2020).

Akibat penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan

Halaman 113

keuangan desa menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Mubyarto dan Suryatini, 2020). Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa menjadi landasan pengelolaan keuangan desa, yang mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, yang dapat berupa uang dan non-uang. -barang moneter (Wardani dan Andriyani, 2017). Aspek tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik mencakup penerapan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menjamin pengelolaan keuangan desa terlaksana secara efektif. Selain itu pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara metodis dan disiplin, khususnya anggaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Ahmad dan Sapar, 2023).

Beragam penelitian yang dilakukan di Indonesia telah mengungkap berbagai aspek terkait pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji elemen-elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, melakukan penelitian seperti ini sangatlah penting untuk memberikan pemahaman yang berharga kepada pemerintah desa dalam mengatasi tantangan yang muncul secara efektif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dipengaruhi oleh cara penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan desa merupakan salah satu faktor krusial yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Kuncayho dan Dharmakarja, 2022). Pemerintah desa harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan. Menurut Septa (2018), terdapat korelasi langsung antara kualitas penyajian laporan keuangan dengan kejelasan pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Alasannya adalah seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan akan diungkapkan secara lengkap dan akurat dalam laporan keuangan pemerintah desa, sehingga menumbuhkan akuntabilitas yang kuat (Khoirina & Widaryanti, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Astungkara dkk (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara cara penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Meilani dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dan menegaskan pentingnya penyajian laporan keuangan yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Upaya terus-menerus untuk menyempurnakan proses penyampaian laporan keuangan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sya'diah dan Hafiz (2022) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang jelas dan jujur merupakan dasar penting bagi pemerintah desa untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang setinggi-tingginya. Laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami oleh publik memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyelewengan. Menurut Puspa dan Prasetyo (2020), pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, perlu adanya pelatihan dan edukasi bagi perangkat desa terkait penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan keuangan desa erat kaitannya dengan akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengawasi dan mengelola dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Syahputra (2019) menyoroti bahwa permasalahan pengelolaan keuangan desa yang tidak memadai dan efisien telah menjadi perhatian publik dan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi yang melibatkan dana desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di sektor anggaran desa terus meningkat. Dari total 271 kejadian korupsi, 46 kasus terdokumentasi khusus di bidang anggaran desa pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi khususnya di bidang anggaran desa. Dari total 169 kasus korupsi, 126 kasus terkait dengan sektor anggaran desa. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi yang tercatat di sektor anggaran desa, dari total 200 kasus korupsi yang dilaporkan (katadata.co.id, 2022). Meilani & Sukarmanto (2022) berpendapat bahwa maraknya kasus korupsi di sektor anggaran desa menunjukkan pentingnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan menerapkan langkah-langkah seperti memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa, membuat laporan keuangan yang

komprehensif dan mudah dipahami, dan mengintensifkan pengawasan terhadap penggunaan dana daerah. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk membina kolaborasi aktif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Aprilia, 2019). Melihat latar belakang dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, serta menyadari pentingnya akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa secara efektif untuk membina desa sejahtera dengan memberikan desa otonomi dalam menangani keuangannya, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa”**.

Penyajian laporan keuangan desa mempunyai peranan penting dalam menetapkan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keuangan desa. Pemerintah desa harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Memastikan penyertaan data yang komprehensif dalam pelaporan keuangan membantu membangun rasa tanggung jawab dan kewajiban (Meilani dan Sukarmanto, 2022). SAP Nomor 71 Tahun 2010, khusus PSAP 01 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan terorganisir yang memberikan informasi mengenai status keuangan dan transaksi suatu usaha pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang posisi keuangan entitas pelapor, kinerja anggaran, saldo anggaran surplus, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Informasi ini berharga bagi pengguna dalam mengambil dan menilai keputusan terkait alokasi sumber daya (Astungkara et al, 2023). Shadrina & Hidajat (2023) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang telah diberikan. Menurut Harahap (2023), berikut karakteristik laporan keuangan yang baik:

- a. Sesuai standar akuntansi, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, seperti SAP No. 71 Tahun 2010 tentang PSAP 01.
- b. Lengkap, laporan keuangan harus memuat seluruh informasi keuangan yang relevan, termasuk pendapatan, belanja, aset, dan liabilitas.
- c. Transparan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna, baik yang memiliki pengetahuan akuntansi maupun yang tidak.
- d. Tepat Waktu, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Akuntabel, laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ketersediaan laporan keuangan desa merupakan elemen penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudahan akses terhadap informasi keuangan desa memungkinkan masyarakat untuk mencermati dan menilai pemanfaatan keuangan desa oleh pemerintah desa. Mawaddah et al (2019) menegaskan bahwa penentu utama efektivitas pemanfaatan informasi keuangan adalah ketersediaan laporan keuangan yang dapat diakses. Masyarakat umum harus diberikan sarana yang mudah untuk memperoleh laporan keuangan, sehingga memungkinkan mereka memahami dan memanfaatkan informasi keuangan untuk berbagai tujuan, termasuk pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi. Menurut Temalagi dan Anakota (2021), laporan keuangan dapat diakses melalui berbagai saluran media antara lain surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website, dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan individu untuk memilih media yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Wardana (2016) mengajukan sejumlah kriteria penilaian aksesibilitas laporan keuangan desa, antara lain:

- a. Terbuka di media massa, laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, seperti surat kabar dan majalah, sehingga masyarakat dapat melihat langsung informasi keuangan desa.
- b. Kemudahan dalam memperoleh informasi, masyarakat harus mudah mendapatkan informasi tentang laporan keuangan desa, baik secara langsung di kantor desa maupun melalui media lainnya.
- c. Aksesibilitas melalui internet, mengaksesnya dengan mudah kapanpun dan dimanapun.

Manfaat aksesibilitas laporan keuangan yang baik:

- a. Meningkatkan transparansi, aksesibilitas laporan keuangan rutin memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan wawasan komprehensif mengenai penggunaan dana desa.
- b. Peningkatan akuntabilitas, pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, individu yang memiliki akses terhadap informasi keuangan mengenai desa akan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan proses pengambilan keputusan.
- d. Akses masyarakat yang lebih mudah terhadap informasi keuangan memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Akuntabilitas merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan desa. Akuntabilitas menjamin bahwa pemerintah desa mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana daerah. Menurut Kusumastuti (2014), akuntabilitas diartikan sebagai persyaratan bahwa penyelenggara kegiatan publik harus menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan langkah, keputusan, dan proses yang dilakukan, serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Meilani dan Sukarmanto (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, perluasan hingga pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan terakhir mencakup pengawasan keuangan desa. Hal inilah yang perlu diungkapkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik kegagalan maupun keberhasilannya, sebagai bahan evaluasi tahun depan. Masyarakat tidak hanya berhak mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2018), terdapat berbagai penanda akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:

- a. Transparansi, Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.
- b. Partisipasi, Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa.
- c. Pertanggungjawaban, Kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat.
- d. Pengawasan, Adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa manfaat penting, yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa.
- c. Mencegah terjadinya penyelewengan dana desa.
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan desa.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *self-report*, sehingga terdapat kemungkinan bias dalam data.

Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Desa di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang berjumlah Sembilan Desa, di antaranya: Desa Bale Brang, Desa Jorok, Desa Labuan Bajo, Desa Motong, Desa Orong Bawa, Desa Pukat, Desa Sabedo, Desa Stowe Brang, dan Desa Tengah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2023 hingga Januari 2024

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat positivis. Ini melibatkan penyelidikan populasi atau sampel, pengumpulan data melalui instrumen penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019).

Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan cara mengirimkan kuesioner kepada seluruh perangkat desa yang terlibat dan bergerak di bidang keuangan desa masing-masing.
- b. Data sekunder, mengacu pada data yang diperoleh dari sumber eksternal yang relevan dengan penyelidikan ini. Data sekunder ini terdiri dari temuan penelitian sebelumnya, literatur ilmiah, dan data yang diperoleh dari subjek penelitian yang penting untuk persiapan penelitian ini.

Kuesioner digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penyelidikan ini. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara menyajikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Strategi pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

Dalam penelitian, pendekatan analisis data yang digunakan disebut analisis kuantitatif, yang mengacu pada kumpulan metodologi dan prosedur yang digunakan untuk memproses, menganalisis, dan menafsirkan data numerik (Hair et al, 2023). Dalam bidang analisis data kuantitatif, berikut beberapa metodologi yang sering digunakan:

a. Statistik Deskriptif

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa statistik deskriptif memberikan ringkasan data dengan melihat angka minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang diteliti, yaitu bagaimana laporan keuangan disajikan dan kemudahan aksesnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Uji Kualitas Data

1) Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai validitas suatu kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji korelasi bivariat yang menguji hubungan antara skor setiap item dengan skor keseluruhan dengan menghitung korelasinya. Validitas uji ditentukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai kritis  $r$  tabel, menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka pengujian tersebut dinyatakan sah. Sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel maka tes tersebut dinyatakan tidak valid (Field, 2023).

2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menilai kemampuan kuesioner untuk memberikan hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, memastikan bahwa kuesioner dapat digunakan berkali-kali dengan responden yang sama. Suatu kuesioner dikatakan dapat dipercaya apabila memenuhi kriteria tersebut. Kisaran Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60 menunjukkan keandalan. Sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60 maka dianggap tidak dapat dipercaya (Pallant, 2023).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah variabel terikat atau variabel bebas berdistribusi normal. Tes Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menilai kenormalan. Menurut Sugiyono (2019), apabila tingkat signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov diatas 0,05 maka menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal.

2) Field (2023) menyatakan bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal harus menunjukkan korelasi nol di antara variabel independennya. Untuk mengidentifikasi tanda-tanda multikolinearitas, dapat dilakukan uji nilai toleransi dan variance inflasi faktor (VIF). Jika nilai toleransi melebihi 0,10 dan variance inflasi faktor (VIF) di bawah 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaliknya jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan variance inflasi faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas dalam penelitian.

3) Heteroskedastisitas menguji apakah residu model regresi mengubah varians antar observasi. Homoskedastisitas adalah ketika varians residunya konstan dan heteroskedastisitas adalah ketika variansnya berbeda. Model regresi yang layak adalah homoskedastik atau nonskedastis. Pendekatan Glejser menguji heteroskedastisitas dengan

melakukan regresi nilai residu absolut dan faktor independen. Heteroskedastisitas tidak ada jika nilai signifikan  $> 0,05$  (Pallant, 2023).

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut Gozali (2018), analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta besarnya pengaruh yang dimilikinya. Untuk melakukan analisis ini, rumus berikut digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Variabel Penyajian Laporan Keuangan

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

$X_1$  = Penyajian Laporan Keuangan

$X_2$  = Aksesibilitas Laporan Keuangan

$e$  = Standar Error

e. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t atau Uji parsial, digunakan untuk menilai kekuatan penjelasan individu dari faktor-faktor independen dalam kaitannya dengan variabel dependen dalam penelitian ini. Uji t mempunyai nilai signifikansi statistik sebesar  $\alpha = 5\%$ . Kriteria penilaian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah untuk menentukan apakah nilai  $p$  yang mewakili signifikansi nilai t kurang dari 0,05. Jika kondisi ini terpenuhi maka hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa suatu variabel independen mempunyai pengaruh yang besar dan bersifat individual terhadap variabel dependen (Field, 2023).

2. Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Pallant (2023), uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh faktor independen mempunyai pengaruh gabungan terhadap variabel yang diuji atau tidak. Saat melakukan uji F untuk pengambilan keputusan, jika tingkat signifikansi kurang dari 5% maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dan mempunyai hubungan yang signifikan secara statistik dengannya. Menurut Field (2023), hipotesis diterima jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, terlepas signifikan atau tidaknya variabel tersebut secara statistik.

3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengkuantifikasi sejauh mana model dapat memperhitungkan fluktuasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan adanya korelasi yang kuat antar variabel (Sugiyono, 2019).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui kuantitas data, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Faktor-faktor penelitian ini antara lain: tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, penyajian dan aksesibilitas informasi keuangan, serta sistem pengendalian internal. Tabel 1 menampilkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	45	15	23	20,12	2,318
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	45	8	13	9,43	1,326
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	45	19	25	21,58	2,273
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian ini adalah 45 responden, dengan standar deviasi sebesar 2,318. Variabel penyajian laporan keuangan berkisar antara minimal 15 hingga maksimal 23. Nilai mean sebesar 20,12 dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai minimum dan tertinggi. Nilai mean yang melebihi nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebut merata.
- Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, menampilkan temuan uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi 1,326. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berkisar antara 8 sampai 13. Nilai mean sebesar 9,43 dapat ditentukan dari nilai minimum dan maksimum yang diberikan. Rata-rata melebihi simpangan baku, yang menunjukkan distribusi data yang seragam.
- Hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan pada tabel 1 menunjukkan bahwa ukuran sampel penelitian ini terdiri dari 45 responden, dengan standar deviasi sebesar 2,273. Variabel yang mewakili akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa berkisar antara nilai minimum 19 hingga nilai maksimum 25. Nilai mean sebesar 21,58 dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai minimum dan tertinggi. Nilai mean yang melebihi nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data tersebut merata.

### **Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik**

<b>Uji Penelitian</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Hasil</b>		<b>Keterangan</b>	
		<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>		
Uji Normalitas	P-Value > 0,05	0,361		Data terdistribusi secara normal	
Uji Multikolinearitas	Tolerance > 0,1; VIF < 10	X1 X2	0,417 0,664	1,592 2,162	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Sig. > 0,05	X1 X2	0,178 0,284	0,178 0,284	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis uji asumsi klasik pada tabel 2 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Uji normalitas, berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,361 yang berarti lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.
- Uji Multikolinearitas, pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh nilai toleransi variabel independen lebih besar dari 0,10, dan semua nilai variance inflasi faktor (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen.
- Uji Heteroskedastisitas, mengacu pada tabel 2 terlihat bahwa nilai signifikansi (sig.) variabel independen melebihi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda****Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Koefisien Regresi
Konstanta	3,273
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,514
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,528

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 di atas, diperoleh persamaan regresi yaitu,  $Y = 3,273 + 0,516X1 + 0,528X2 + e$ . Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diambil suatu analisis bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 3,273 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 3,273 satuan.
- Koefisien regresi untuk variabel penyajian laporan keuangan adalah sebesar 0,514 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika penyajian laporan keuangan ditingkatkan namun faktor lainnya tetap sama, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan meningkat sebesar 51,4%.
- Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,528 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika aksesibilitas laporan keuangan ditingkatkan namun variabel lainnya tetap sama, maka akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 52,8%.

**Uji Hipotesis****Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Uji Penelitian	Kriteria	Hasil			Keterangan
Uji F	Sig.<0,05	F-hitung= 3,716, sig.= 0,031			Lolos Uji Statistik F
Uji T	Sig.<0,05				
		<b>Sig.</b>	<b>t-hitung</b>	<b>Koefisien</b>	
		X1	0,012	3,217	0,514
		X2	0,014	3,162	0,528
Uji R-square	$0 \leq R^2 \leq 1$		0,462		Sebanyak 46,2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dijelaskan oleh variabel penelitian

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian belum lengkap yang disajikan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:

**1. Uji-t (Parsial)**

- Nilai p-value variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,012 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,217 lebih besar dari nilai t kritis sebesar 2,004. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis pertama dapat di terima.
- Nilai p-value variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,014 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 3,162 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,004. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu hipotesis kedua dapat di terima.

**2. Uji-f (Simultan)**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji F yang disajikan pada Tabel 3 adalah nilai signifikansi sebesar 0,031 berada di bawah ambang batas 0,05, dan nilai F hitung sebesar 3,716.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara simultan dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel 3 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa 46,2% variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, kemudian sisanya sebesar 53,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa format laporan keuangan yang bervariasi mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Apabila pemerintahan desa di Kecamatan Utan menyajikan laporan keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa-desa di Kecamatan Utan akan terlihat efektif. Peningkatan penyajian laporan keuangan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah desa dengan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diungkapkan secara lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini membantu mengatasi segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah secara langsung meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septa (2018), Syahputra (2019), dan Paramayana dkk (2022). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang lebih efektif berhubungan dengan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi. Melalui penerapan aturan pemerintah, akan terjadi peningkatan transparansi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.

### 2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap tanggung jawab penyelenggaraan keuangan desa. Dengan mempublikasikan secara terbuka pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Utan melalui media massa, maka pengguna akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai laporan keuangan desa. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap laporan keuangan desa melalui internet (website), sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Utan. Lebih-lebih lagi. Ketersediaan laporan keuangan desa berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Meningkatnya aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat memberikan banyak manfaat, antara lain memudahkan masyarakat desa mengakses laporan keuangan sehingga dapat mengetahui pemanfaatan dana desa. Hal ini pada gilirannya membantu mencegah penyelewengan dana dan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa. Temuan penelitian ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020), Shadrina dan Hidajat (2023), serta Khoirina dan Widaryanti (2023) yang menunjukkan bahwa ketersediaan laporan keuangan desa berdampak positif terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. . Oleh karena itu, aksesibilitas informasi keuangan desa berkorelasi langsung dengan efektivitas pengawasan keuangan desa. Peningkatan ketersediaan laporan keuangan desa melalui publikasi terbuka, forum sosialisasi dan komunikasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam meminta informasi, memantau, dan memberikan masukan, merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak aksesibilitas dan penyajian laporan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat pedesaan. Kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan wacana peneliti pada bab

sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
3. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara siluman berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan kajian yang lebih mendalam diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak format dan ketersediaan laporan keuangan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini termasuk mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. and Sapar, S. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten luwu timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 3(2), 81-93. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.278>

Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(2), 109-122.

Arfiansyah, M. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jifa (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>

Astungkara, D., Rahmawati, D., & Supriyanto, A. (2023). Analisis pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(1), 1-14.

Astungkara, I. W. D., Putra, I. A. G. D., & Dayinta, F. L. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 43(4), 773-788.

Field, A. (2023). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (9th ed.)*. London: Sage Publications.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2023). *Multivariate data analysis (9th ed.)*. New York: Pearson.

Harahap, S. F. (2023). Analisis laporan keuangan: Teori dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.

Khoirina, A., & Widaryanti, W. (2023). Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 196-210.

Kuncahyo, H. and Dharmakarja, I. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan mojogedang karanganyar jawa tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299-319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>

Mawaddah, N., dkk. (2019). Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 154-166.

Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022, January). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. In Bandung Conference Series: Accountancy (Vol. 2, No. 1, pp. 59-65).

Mubyarto, & Suryatini, E. (2020). *Membangun desa: Teori, kebijakan, dan praktik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jai.18159>

Pallant, J. (2023). *SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using IBM SPSS* (8th ed.). London: Routledge.

Paramayana, A., Dewi, R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Owner*, 6(4), 4108-4112. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298.

Putri, L. S., & Maryono. (2022). *Peran dan Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Penyempurnaan*. Jakarta: Pusat Peraturan Perundang-Undangan.

Septa, P. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan kabupaten ponorogo (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).

Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459-466.

Soetjipto, H. (2018). *Desa dan pembangunan: Perspektif sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sya'diah, H., & Hafiz, A. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 130-138.

Syahputra, M. I. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).

Temalagi, D. R., & Anakota, W. (2021). Aksesibilitas laporan keuangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 1-14.

Wardana, I. G. A. K. (2016). Analisis aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangan desa di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 157-166.

Wardani, D. and Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di kabupaten klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>